



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DYAH PURBANDARI MULAT UTAMI
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 212714

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 932.104.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 380 m2/108 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 565.860.000
2. Tanah Seluas 3831 m2 di SEMARANG, WARISAN Rp. 116.244.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/50 m2 di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 291.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA VEGA ZR SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOBIL, PEUGEOT SEDAN Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
5. MOBIL, KIA SPORTAGE JEEP Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
6. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
7. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 25.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.721.109.762
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.969.713.762
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.969.713.762

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.